

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI TERHADAP MENTAL PSIKOLOGIS DAN CARA BERFIKIR MAHASISWA STKIP PGRI SUMENEP

Iskandar

(Dosen Prodi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumenep)

Email: iskandarjohar@yahoo.co.id

Abstrak

Pendidikan anti korupsi mulai diajarkan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Akan tetapi setelah mempelajarinya di sekolah, apakah pendidikan anti korupsi memiliki pengaruh terhadap perkembangan mental psikologis seseorang dan cara berfikir mereka dalam kehidupan sehari-hari? Penelitian ini adalah studi deskriptif kualitatif yang memberikan gambaran tentang penerapan pendidikan anti korupsi terhadap mental psikologis dan cara berfikir mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika di STKIP PGRI Sumenep. Teknik pengumpulan data antara lain tes, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data penelitian ini adalah analisa deskriptif data reduksi, sintesis, data presentasi, dan kesimpulan. Dalam penelitian ini penerapan mata kuliah anti korupsi pada satu sisi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir mahasiswa akan tetapi di sisi lain mata kuliah ini tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap mental psikologis mahasiswa.

Kata Kunci: *Implementasi, Pendidikan Anti Korupsi, Mental Psikologis, Pola pikir*

Abstract

Anti-corruption education began to be applied in education from primary school to the university. But after learning in school, does the anti-corruption education have an impact on the mental psychological and development of a person's way of thinking in their daily lives? In this research is discussed about how the implementation of anti-corruption education course on mental psychological and way of thinking of the students of Mathematics Education department in STKIP PGRI Sumenep. This research is a descriptive qualitative study which is to give an overview of the implementation of anti-corruption education course on mental psychological and way of thinking of the students of Mathematics Education department STKIP PGRI Sumenep. The data collection techniques were tests, interviews and documentation. The data analysis was descriptive analysis of data reduction, synthesis, data presentation, and conclusion. In this research the implementation of anti-corruption education course on one hand, had a significant effect on the students' way of thinking but on the other hand, the implementation of anti-corruption education course on mental psychological impact was not significant.

Key Words: *Implementation, Education Anti-Corruption, Mental Psychological, Way of Thinking*

A. Pendahuluan

Maraknya perilaku tindak pidana korupsi di Indonesia belakangan ini seolah menambah daftar panjang Indonesia dalam deretan negara terkorup di dunia. Upaya pemberantasannya oleh pemerintah belum menuai hasil seperti yang diharapkan. Perilaku korupsi di Indonesia semakin mengakar, dan seakan menjadi trend di kalangan para oknum pejabat. Suatu kondisi yang sungguh ironis, di tengah-tengah upaya keras pemerintah memberantas korupsi, di pihak lain para oknum pejabat, bahkan aparat penegak hukum justru kerap kali terlibat sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Budaya korupsi yang semakin mengakar di Indonesia, seyogyanya diberantas sampai ke akarnya hingga menghilangkan budaya tersebut, dan upaya pemberantasannya tidak cukup dilakukan oleh pemerintah saja. Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi kewajiban seluruh warga. Semua pihak dan semua kalangan.

Upaya pencegahan korupsi Menurut Wijayanto (dalam Dikti: 2011) dapat dilakukan melalui 4 pendekatan. Salah satunya adalah melalui pendekatan budaya (*Cultural approach*). Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap anti-korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Meski pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, namun biaya yang dibutuhkan tidaklah besar (*low costly*), sedangkan hasilnya akan berdampak

jangka panjang (*long lasting*).

Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan dan penanaman moral seyogyanya menjadi suatu keniscayaan, karena salah satu hal mendasar yang dapat menjelaskan tentang meluasnya perilaku dan sikap korupsi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari adalah kurangnya peran pendidikan nilai, moral, dan norma agama terhadap pembentukan watak dan karakter seseorang. Rendah dan rusaknya moralitas serta mentalitas yang barakhir pada praktik korupsi di Indonesia disebabkan oleh dasar pendidikan yang masih menghasilkan pola pikir yang mengarah pada aspek kognitif saja atau bahkan pendidikan kadang banyak diperoleh dengan jalan pintas dimana seseorang kadang berfikir bahwasanya pendidikan tidak ditekankan pada pencapaian nilai dengan kerja keras, namun lebih sering ditentukan oleh hasil semata.

Implikasi dari pola pikir yang mengarah pada aspek kognitif semata dalam pendidikan akan menghasilkan para intelektual muda yang cerdas semata di satu sisi, akan tetapi pada saat yang sama mereka juga memiliki keterbatasan moral. Maka tidak jarang para pejabat yang telah mengenyam pendidikan tinggi, banyak dari mereka terjerat kasus tindak pidana korupsi. Suatu realitas yang sangat berseberangan dengan output dan makna pendidikan itu sendiri. Dalam undang-undang yang menjadi dasar atau regulasi dalam pendidikan nasional yakni UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional. Memberi-

kan definisi pendidikan yang pada intinya berbunyi:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Pendidikan nilai di sekolah ataupun di lembaga belajar lainnya juga dapat ditanamkan melalui budi pekerti. Kilpatrick (dalam Zuriah: 2007) menyatakan bahwa budi pekerti seseorang dapat dikembangkan dengan menggunakan landasan kemampuan dan kebiasaan hidup orang itu berdasarkan norma masyarakat tempat hidupnya. Norma masyarakat inilah yang menjadi acuan bagi aktivitas seseorang termasuk di dalamnya cita-cita hidup, cara yang ditempuh untuk mencapai keinginan, dan kemauan bekerja sama dengan orang lain dalam masyarakat. Dengan demikian, perkembangan budi pekerti merupakan aneka ragam pengalaman peran berdasarkan situasi tertentu sehingga mampu mengatasi masalah budi pekerti atas prakarsanya sendiri secara bebas (tanpa diawasi orang lain) dan memilih objek budi pekerti yang penting dan berguna bagi dirinya. Pendapat inilah yang mendasari prinsip bahwa lembaga pendidikan atau sekolah dapat memberikan

sumbangan yang matang tentang budi pekerti seseorang.

Selain di sekolah pemerintah juga telah mencanangkan program dalam rangka memberantas korupsi di tanah air. Salah satunya adalah memberlakukannya mata kuliah anti korupsi pada semua jenjang S-1. Pendidikan Anti Korupsi merupakan usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan proses belajar-mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi, didesain bukan hanya sebagai perpindahan pengetahuan tentang faktor-faktor penyebab korupsi tetapi lebih cenderung penekanannya pada nilai-nilai kepribadian dan karakter (afektif) dari mahasiswa. Jika nilai-nilai kepribadian tersebut telah tertanam pada mental dan psikologis mahasiswa, akan lebih mudah bila diterapkan pada aspek psikomotorik dari mahasiswa.

Pendidikan anti korupsi pada jenjang S-1 diharapkan memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan mental dan psikologis anti korup terhadap output lembaga pendidikan. Bambang Anggoro (Shabrina, 2013) mengatakan "Sebenarnya akar dari permasalahan korupsi di Indonesia adalah budaya yang selama ini tertanam di dalam diri kebanyakan orang Indonesia yang telah terbiasa untuk melanggar aturan, dengan adanya mata kuliah ini kami mengharapkan tertanamnya juga nilai-nilai dan budaya anti korupsi pada mahasiswa yang akan dibawa saat menjadi orang yang memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa nantinya".

menciptakan manusia susila, manusia yang berbudi luhur. Pendidikan dapat dikatakan menjadi ujung tombak keberhasilan bangsa ini, karena bangsa yang baik adalah bangsa yang mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi. Namun kita ketahui pada akhir-akhir ini seiring berkembangnya ilmu pengetahuan yang pesat, justru Negara semakin banyak dirugikan karena banyaknya orang-orang yang menggelapkan dana tidak sesuai dengan jalannya. Selama ini dunia pendidikan kecenderungannya hanya lebih memperhatikan kecerdasan kognitif saja tanpa menyeimbangkan dengan kecerdasan afektif dan psikomotorik. Padahal kecerdasan emosional dan kecerdasan afektif juga sangat penting diajarkan.

Terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang banyak dilakukan oleh pejabat, baik dari lembaga kecil sampai pada lembaga pemerintahan sering banyak dilakukan oleh para orang-orang yang pendidikannya tinggi, tetapi pada keyataannya pendidikan yang tinggi tidak menjamin bahwa seseorang mampu berbuat jujur dan sesuai jalan dan prosedur yang ditentukan. Padahal di sekolah, sering kali diajarkan bagaimana kita berbuat jujur, amanah, qonaah dan beretika baik, namun teori yang sering disinggung oleh para guru mungkin hanya sepiantas saja melekat dimemori otak para peserta didik.

Dalam upaya pemerintah memberantas korupsi melalui pendidikan baik di tingkat sekolah maupun tingkat perguruan tinggi memang tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Pember-

antasan korupsi dapat diawali dengan membangun kejujuran pada diri masing-masing. Kejujuran yang dibangun dalam dunia sekolah bukan hanya diciptakan pada siswa saja melainkan dimulai dari kepala sekolah, para guru. Misalnya saja upaya dalam membangun kejujuran di sekolah yang memberlakukan warung kejujuran, dimana siswa membeli kue atau barang-barang di kantin tanpa ada petugas yang menjaga. Hal ini dilakukan untuk melatih kejujuran siswa bahwa dalam kondisi apapun siswa tetap jujur meskipun tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Selain itu peran guru juga menjadi penting dalam mengarahkan siswa-siswanya baik dalam bertutur kata, maupun dalam tingkah laku.

C. Pendidikan Anti Korupsi dan Implementasinya Terhadap Mental Psikologis dan Cara Berfikir Mahasiswa

Asal kata dari korupsi sebagaimana dijelaskan oleh Indonesian Corruption Wach dalam "Pengertian- pengertian Dasar Korupsi" sebagaimana dikutip Suradi berasal dari bahasa Latin, "Corruptio" atau "Corruptus". Selanjutnya disebutkan bahwa "Corruptio" berasal dari kata "Corrumpere" suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris : Corruption, Corrupt; Perancis : Corruption dan Belanda : Corruptie (korruptie). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia "Korupsi". Arti harfiahnya ialah : Kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat

disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Meskipun memiliki makna yang luas, namun kata "Corruptio" dapat dipersamakan artinya dengan "Penyuapan". (Suradi, 2002:61)

Arti kata korupsi disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ialah perbuatan yang buruk seperti pengertian penggelapaan uang, penerimaan uang sogokan sebagainya. (Poerwadarminta dalam Suradi, 2002:61)

Menurut Encyclopedia Americana, korupsi adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya bervariasi menurut waktu, tempat dan bangsa. Sedang korupsi menurut Kamus Hukum Prof Raden Subekti Tjitrosoedibio, adalah dengan melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan /perekonomian negara. (Kamus Hukum Prof Raden Subekti Tjitrosoedibio, dalam Suradi, 2002:61).

Dari pengertian korupsi di atas terdapat persamaan persepsi bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk yang dapat menimbulkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat pada umumnya.

Pendidikan Anti Korupsi merupakan salah satu mata kuliah pilihan dengan bobot 3 sks. Tujuan dari adanya matakuliah ini ialah; agar mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk korupsi, faktor penyebab tindakan korupsi, sanksi pidana atas korupsi, pen-

anganan terhadap tindakan korupsi, dan pembentukan karakter mahasiswa yang anti terhadap korupsi. Dalam mata kuliah ini dibahas segala pengetahuan mengenai korupsi mulai dari definisi, sejarah, faktor penyebab, prespektif dari segala bidang, faktor pengontrol, model pemberantasan korupsi di negara lain, serta peran masing-masing stake holder dalam upaya pemberantasan korupsi. "Knowledge mengenai korupsi itu sangat penting, karena salah satu faktor penyebab terjerumusnya seseorang pada tindakan korupsi adalah ketidakpahaman mengenai hal tersebut.

Dalam Perkuliahan ini dibahas tentang kewajiban warga negara, lembaga negara, dan organisasi yang berperan dalam bidang pemberantasan korupsi baik dalam kajian hukum perundang-undangan maupun pada dimensi sosial dan politik, terutama perkembangan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pendekatan dalam pemecahan masalah dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi adalah dengan menggunakan : pendekatan interdisipliner; pendekatan multidisipliner; pendekatan transdisipliner; pendekatan krosdisipliner atau paling tidak dengan menggunakan pendekatan multi aspek /pendekatan multi dimensi.

Dalam buku Matakuliah Anti-korupsi yang diterbitkan Dikti ini tidak berlandaskan pada salah satu perspektif keilmuan secara khusus. Berlandaskan pada fenomena permasalahan serta pendekatan budaya yang telah diuraikan di atas, matakuliah ini lebih menekankan

pada pembangunan karakter anti-korupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa. Dengan demikian tujuan dari matakuliah Anti-korupsi adalah membentuk kepribadian anti-korupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Bambang Anggoro (Shabrina, 2013) mengatakan "Sebenarnya akar dari permasalahan korupsi di Indonesia adalah budaya yang selama ini tertanam di dalam diri kebanyakan orang Indonesia yang telah terbiasa untuk melanggar aturan, dengan adanya mata kuliah ini kami mengharapkan tertanamnya juga nilai-nilai dan budaya anti korupsi pada mahasiswa yang akan dibawa saat menjadi orang yang memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsa nantinya".

Standar kompetensi peserta didik dengan menyesuaikan tingkat peserta didik yaitu mahasiswa tingkat sarjana (S1), maka kompetensi yang ingin dicapai adalah :

1. Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*).
2. Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut.
3. Mahasiswa mampu mendeteksi

adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada penegak hukum).

Sikap anti-korupsi ini kemudian memberikan efek-tular ke lingkungan sekitar dimana mahasiswa berani mengingatkan atau mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dalam bentuk apapun, termasuk mampu memberikan informasi kepada orang lain mengenai hal-hal terkait korupsi dan anti-korupsi.

Kompetensi selanjutnya adalah mahasiswa mampu mendeteksi adanya suatu tindak korupsi secara komprehensif mulai dari bentuk, proses, peraturan yang dilanggar, pelaku, kerugian/dampak yang ditimbulkan; selanjutnya mampu menghasilkan penyelesaian masalah (*problem solving*). Melaporkan kepada penegak hukum mungkin saja dilakukan, namun harus memiliki bukti-bukti yang valid.

Mata kuliah pendidikan anti korupsi jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan mahasiswa tentunya akan memberikan efek positif, terlebih lagi jika pendidikan anti korupsi ini disajikan pada mahasiswa sampai pada tingkat pemahaman secara mental dan psikologis yang kemudian akan diproses pada cara mereka berfikir dan menyelesaikan permasalahan dalam kehidupannya.

Istilah mental seringkali digunakan untuk menyebut kapasitas psikologis orang dalam merespon problem-problem kehidupan. Terkadang ada seseorang yang memiliki kemampuan untuk

menghadapi problem seberat apapun dan seberapa lamapun. Namun ada pula seseorang memiliki kapasitas psikologis dibawah normal. Sikap mental ini dapat dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan dalam sehari-hari. Namun membangun kebiasaan baik ini tentu bukan hal yang mudah.

Mental berkaitan dengan psikologis seseorang. Banyak ahli mengemukakan bahwa mental merupakan bagian dari psikologis jiwa seseorang. Psikologi berasal dari kata dalam bahasa Yunani *Psychology* yang merupakan gabungan dari kata *psyche* dan *logos*. *Psyche* berarti jiwa dan *logos* berarti ilmu. Secara harafiah psikologi diartikan sebagai ilmu jiwa (Hariyanto, 2011). Istilah *psyche* atau jiwa masih sulit didefinisikan karena jiwa itu merupakan objek yang bersifat abstrak, sulit dilihat wujudnya, meskipun tidak dapat dimungkiri keberadaannya. Dalam beberapa dasawarsa ini istilah jiwa sudah jarang dipakai dan diganti dengan istilah psikis. Ada banyak ahli yang mengemukakan pendapat tentang pengertian psikologi, diantaranya:

1. Pengertian Psikologi menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia Jilid 13 (dalam Hariyanto: 2011) Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan binatang baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung.
2. Pengertian Psikologi menurut Dakir (dalam Hariyanto, 2011) psikologi membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya

dengan lingkungannya.

3. Pengertian Psikologi menurut Muhibbin Syah (dalam Hariyanto, 2011), psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku terbuka dan tertutup pada manusia baik selaku individu maupun kelompok, dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku terbuka adalah tingkah laku yang bersifat psikomotor yang meliputi perbuatan berbicara, duduk, berjalan dan lain sebagainya, sedangkan tingkah laku tertutup meliputi berfikir, berkeyakinan, berperasaan dan lain sebagainya.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun yang tidak disadari.

Dari pengertian mental dan psikologi di atas maka dapat ditarik suatu garis lurus bahwasanya mental dan psikologi seseorang akan berdampak pada tingkah laku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya juga berhubungan dengan cara berfikir seseorang. Karena berfikir adalah suatu proses dialektis artinya, selama kita berfikir, fikiran kita mengadakan tanya jawab dengan fikiran kita, untuk dapat meletakkan hubungan-hubungan antara pengetahuan kita

itu, dengan tepat. Pertanyaan itulah yang memberi arah kepada pikiran kita dan menerapkannya pada tingkah laku kita sehari-hari.

Pada saat seseorang belajar juga terjadi proses berpikir, sebab pada saat belajar mahasiswa melakukan kegiatan mental. Dalam berpikir itu seseorang menghubungkan antara bagian-bagian informasi yang telah ada dalam pikiran. Berpikir merupakan salah satu aktivitas berbicara dengan diri sendiri yang dapat membantu merumuskan jalan pikiran dengan lebih jelas dan teliti. Berpikir bukanlah sesuatu yang dapat dilihat dan didengar. Tentu saja seseorang tidak dapat mengetahui apa yang dipikirkan oleh orang lain jika tidak diungkapkan dengan jelas. Ada berbagai cara yang dapat mengungkapkan gagasan/pikiran, yaitu dengan tanda atau isyarat ataupun dengan bahasa, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan.

Dari beberapa kajian di atas dapat diperoleh suatu simpulan bahwa tingkah laku seseorang berawal darimana seseorang mampu berfikir dengan baik dan menanamkan apa yang dipikirkan ke dalam mental psikologis jiwanya.

D. Gambaran Subjek Penelitian dan Pelaksanaan Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi

Subjek peneliti ini adalah mahasiswa semester 6 yang telah memperoleh mata kuliah pendidikan anti korupsi. Jumlah keseluruhan mahasiswa adalah 32. Namun peneliti hanya memilih 17 orang mahasiswa, karena 17 orang mahasiswa

tersebut selain telah menempuh mata kuliah pendidikan anti korupsi, juga terlibat dalam suatu kegiatan kemahasiswaan dan pengelolaan suatu kegiatan yang tergabung dalam suatu Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP). Melalui HMP, mahasiswa semester VI terlibat dalam suatu kegiatan penyelenggaraan kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan olimpiade matematika tingkat SMA/MA se-Madura. Dari kegiatan ini sekaligus akan diteliti bagaimana mata kuliah anti korupsi dapat berdampak pada kegiatan dan aktivitas mereka sehari-hari.

Pelaksanaan mata kuliah pendidikan anti korupsi diampu oleh mahasiswa semester VI dan memiliki bobot 3 sks yang terbagi dalam bentuk perkuliahan, tugas terstruktur dan tugas mandiri. Mata kuliah pendidikan anti korupsi di program studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumenep baru dilaksanakan dua kali yakni pada semester genap tahun akademik 2013/2014 dan semester genap TA 2014/2015.

Dari dokumentasi silabus dan RPP serta hasil wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi bahwasanya materi yang terdapat pada mata kuliah ini mengacu pada buku pedoman yang dikeluarkan oleh Tim DIKTI. Selain itu rujukan dari buku referensi lainnya juga menjadi buku pendukung dari mata kuliah pendidikan anti korupsi. Adapun mata kuliah pendidikan anti korupsi didalamnya membahas tentang pengertian korupsi, faktor penyebab korupsi, dampak per-

ilaku korupsi, upaya pemberantasan korupsi serta tindak pidana korupsi.

Mata kuliah pendidikan anti korupsi diselenggarakan dengan waktu tatap muka 150 menit ditambah dengan tugas terstruktur dan tugas mandiri. Perkuliahan dirancang untuk dilaksanakan sebanyak 14 – 16 kali tatap muka atau selama satu semester. Setengah dari jadwal perkuliahan diisi dengan pemberian materi dasar bab 1 s/d bab 8. Setengah sisanya antara lain dapat diisi dengan kuliah umum dari para tokoh pemberantasan korupsi, studi kasus, pemutaran film dan analisisnya, tugas investigasi, tugas observasi, tugas pembuatan makalah yang terkait dengan pemberantasan korupsi.

Berdasarkan wawancara dengan Dosen Pengampu, metode yang digunakan dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi di program studi pendidikan matematika STKIP PGRI Sumenep, selain metode ceramah yang menjelaskan teori, metode lainnya juga digunakan seperti diskusi kelas, studi kasus, dan kuliah umum.

Pada metode ceramah, Dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi menjelaskan tentang teori-teori dasar pengertian korupsi, anti korupsi, strategi dan upaya pencegahan korupsi, dampak terhadap individu pelaku dan masyarakat sosial dari tindak korupsi. Metode diskusi kelas juga menjadi metode yang digunakan dalam perkuliahan ini yang bertujuan untuk menumbuhkan kepekaan dan membangun kerangka berfikir mahasiswa dengan

membangun argumen-argumen mahasiswa. Selain itu dosen pengampu juga memberikan satu bahan diskusi untuk didiskusikan oleh kelompok mahasiswa dan mahasiswa membuat skema perbaikan sistem yang bisa menyelesaikan masalah korupsi.

Selain itu, metode studi kasus juga digunakan yakni mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik terkini yang sedang dibahas, seperti kasus korupsi, kasus faktor penyebab korupsi, kasus dampak korupsi, kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain.

Kuliah umum juga dilaksanakan sebagai menunjang mata kuliah pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di program studi pendidikan matematika. Pada kuliah umum menghadirkan seorang pembicara tamu untuk berbagi pengalaman dan membahas permasalahan pemberantasan dan pencegahan korupsi.

E. Implementasi Mata Kuliah Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Cara Berfikir Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumenep

1. Pengetahuan Dasar Korupsi dan Pendidikan Anti Korupsi

Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi terhadap pemahaman mahasiswa semester VI program studi pendidikan matematika tentang korupsi dan tindak pidana korupsi memberikan pengaruh yang sangat positif. Setelah diberikan soal kepada mereka terkait pemahaman mereka tentang Pendidikan Anti Korupsi,

72,5% mereka dapat mengetahui pengertian korupsi dan anti korupsi, 82,3% dari mereka dapat mengetahui tujuan dari dilakukannya pendidikan anti korupsi, 94,11% mereka mengetahui penerapan pendidikan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari dan 88,23% dari mahasiswa mengetahui tentang ciri-ciri dari tindakan anti korupsi.

2. Faktor-Faktor Terjadinya Korupsi

Faktor pendorong adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan bahwa korupsi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah. Jack Bologne (Kemdikbud, 2011:46) menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi :

1. Greeds (keserakahan): berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
2. Opportunities (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
3. Needs (kebutuhan): berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
4. Exposures (pengungkapan): berkaitan dengan tindakan atau kon-

sekuensi yang dihadapi.

Faktor-faktor Greeds dan Needs berkaitan dengan individu pelaku (actor) korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban.

Menurut Arya Maheka, (2008:23) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah :

1. Penegakan hukum tidak konsisten : penegakan hukum hanya sebagai meke-up politik, bersifat sementara dan selalu berubah tiap pergantian pemerintahan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang karena takut dianggap bodoh bila tidak menggunakan kesempatan.
3. Langkanya lingkungan yang antikorup : sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas.
4. Rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara. Pendapatan yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
5. Kemiskinan, keserakahan : masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan

segala cara untuk mendapatkan keuntungan.

6. Budaya member upeti, imbalan jasa dan hadiah.
7. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi : saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Rumus: Keuntungan korupsi > kerugian bila tertangkap.
8. Budaya permisif/serba membolehkan; tidak mau tahu : menganggap biasa bila ada korupsi, karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.
9. Gagalnya pendidikan agama dan etika : agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Pemeluk agama menganggap agama hanya berkuat pada masalah bagaimana cara beribadah saja. Sehingga agama nyaris tidak berfungsi dalam memainkan peran sosial. Menurut Franz, sebenarnya agama bisa memainkan peran yang besar dibandingkan instansi lainnya. Karena adanya ikatan emosional antara agama dan pemeluk agama tersebut jadi agama bisa menyadarkan umatnya bahwa korupsi dapat memberikan dampak yang sangat buruk baik bagi dirinya mau-

pun orang lain. (Franz dalam Maheka, 2008:24).

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Bologne dan Maheka, pemahaman mahasiswa program studi matematika STKIP PGRI Sumenep tentang faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan korupsi berdasarkan menurut mereka antara lain; 1. Adanya kesempatan, 2. Lemahnya pengawasan dari pihak terkait, 3. Gaya hidup, 4. Rendahnya pendapatan, 5. Besarnya keinginan dibandingkan penghasilan yang diperolehnya, serta 6. Godaan dari berbagai pihak atau lingkungan di sekitarnya tentang materi atau kekayaan yang didapatkan dengan waktu yang singkat dan mudah.

Menurut Suradi secara umum terdapat tiga unsur penting yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan atau tindak korupsi: 1. Adanya tekanan (*perceived pressure*), dan tekanan yang paling kuat berkaitan dengan kebutuhan finansial. 2. Adanya kesempatan (*perceived opportunity*), dan 3. Berbagai cara untuk merasionalisasi agar kecurangan dapat diterima. (Suradi, 2002: 131).

3. Dampak Terjadinya Korupsi

Tindak korupsi akan memberikan dampak negatif yang sangat besar baik terhadap sosial masyarakat maupun terhadap individu pelakunya. Mahasiswa memahami dampak terjadinya korupsi pada pemerintah akan mendatangkan kerugian secara finansial, yang berakibat bertambahnya hutang pada negara.

Demikian dalam Dikti, dampak tindak korupsi terhadap negara atau pemerintah antara lain: 1. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, 2. Penurunan produktifitas, 3. Rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, 3. Menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan 5. Meningkatnya hutang negara. (Dikti, 0011: 56-58)

Selain berdampak negatif terhadap negara, tindak korupsi juga berdampak pada sosial dan kemiskinan masyarakat, hal ini dikarenakan beberapa faktor antara lain: 1. Mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, 2. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat 3. Terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. 4. Meningkatnya angka kriminalitas. 5. Solidaritas sosial semakin langka dan demoralisasi. (Dikti, 2011: 58-60) demikian menurut pemahaman mahasiswa tindak korupsi juga memberikan dampak psikologis pada pelaku korupsi akan memberikan beban pikiran dan mental kekhawatiran terhadap apa yang mereka lakukan, meskipun menurut pemahaman mahasiswa, pelaku korupsi merasa senang karena perolehan kekayaan didapatkan dengan mudah dan dalam waktu yang singkat.

4. Strategi dan Upaya

Penanggulangan Tindak Korupsi

Wijayanto (dalam dikti: 2011) mengatakan bahwasanya terdapat 4 (empat) pendekatan yang paling banyak diadopsi oleh berbagai kalangan yaitu: 1) Pendekatan Pengacara (Lawyer approach). Dalam pendekatan ini yang

dilakukan adalah memberantas dan mencegah korupsi melalui penegakan hukum, dengan aturan-aturan hukum yang berpotensi menutup celah-celah tindak koruptif serta aparat hukum yang lebih bertanggungjawab. Pendekatan ini biasanya berdampak cepat (quick impact) berupa pembongkaran kasus dan penangkapan para koruptor, namun memerlukan biaya besar (high costly), meskipun di Indonesia misalnya, tantangan terbesar justru berasal dari para aparat hukum (kepolisian dan pengadilan) itu sendiri. 2) Pendekatan Bisnis (Business approach). Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah mencegah terjadinya korupsi melalui pemberian insentif bagi karyawan melalui kompetisi dalam kinerja. Dengan kompetisi yang sehat dan insentif yang optimal maka diharapkan orang tidak perlu melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan. 3) Pendekatan Pasar atau Ekonomi (Market or Economist approach). Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah menciptakan kompetisi antar agen (sesama pegawai pemerintah misalnya) dan sesama klien sehingga semua berlomba menunjukkan kinerja yang baik (tidak korup) supaya dipilih pelayanannya. 4) Pendekatan Budaya (Cultural approach). Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah membangun dan memperkuat sikap anti-korupsi individu melalui pendidikan dalam berbagai cara dan bentuk. Pendekatan ini cenderung membutuhkan waktu yang lama untuk melihat keberhasilannya, biaya tidak besar (low costly), namun

hasilnya akan berdampak jangka panjang (long lasting).

Keempat pendekatan di atas dapat dilakukan oleh pihak manapun baik dari sektor pemerintah, sektor swasta, organisasi maupun unit-unit masyarakat lainnya. Selama ini tiga pendekatan pertama yaitu pendekatan hukum, pendekatan bisnis dan pendekatan pasar lebih banyak diterapkan karena dianggap paling tepat untuk menangani kasus-kasus korupsi yang sudah terjadi dan mencegah korupsi selanjutnya. Upaya pemerintah juga dalam bentuk adanya komisi pemberantasan korupsi (KPK), dimana KPK telah berhasil mengidentifikasi bentuk kecurangan dan penyimpangan keuangan di berbagai instansi. Meskipun belum maksimal terlaksana pada semua instansi di Indonesia, namun setidaknya dengan adanya KPK ini banyak pihak yang mulai berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, terutama dalam penggunaan anggaran keuangan.

Di Indonesia misalnya, meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan aparat pemerintah sudah berhasil menuntaskan berbagai kasus korupsi besar, berbagai instansi sudah melakukan upaya hukum dan lingkungan kerja yang lebih berintegritas, kenyataannya masih saja banyak terjadi kasus-kasus korupsi. Lebih memprihatinkan, adalah begitu mudahnya korupsi skala kecil (*petty corruption*) dilakukan oleh individu-individu di dalam masyarakat, karena sesungguhnya korupsi besar berasal dari korupsi kecil. Disinilah perha-

tian terhadap pentingnya pendekatan budaya (*cultural approach*) mulai menguat. Pendidikan formal maupun non formal akhirnya menjadi pilihan. Secara umum, pendidikan ditujukan untuk membangun kembali pemahaman yang benar dari masyarakat mengenai korupsi, meningkatkan kesadaran (*awareness*) terhadap segala potensi tindak koruptif yang terjadi, tidak melakukan tindak korupsi sekecil apapun, dan berani menentang tindak korupsi yang terjadi. Tujuan praktis ini, bila dilakukan bersama-sama semua pihak, akan menjadi gerakan massal yang akan mampu melahirkan bangsa baru yang bersih dari ancaman dan dampak korupsi.

Strategi pencegahan tindak korupsi harus dilakukan dengan; 1) Membangun kesadaran seseorang dari sejak dini, 2) Membuat lembaga pengawasan dan pemberantasan korupsi seperti KPK, 3) Memperkuat nilai keagamaan dan pendidikan moral. Upaya dan strategi pemerintah dalam pemberantasan korupsi, sejauh ini dapat dinilai berhasil.

Sebagai upaya penanggulangan korupsi juga bisa dilakukan hukum pidana bagi pelakunya, membuat alat pendeteksi atau software yang mampu melihat tindak korupsi, mengadakan sosialisasi dari lembaga KPK terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan korupsi.

Kesulitan pemerintah dalam memberantas korupsi dikarenakan kurangnya pengawasan yang ketat dari lembaga terkait, banyaknya proyek dari pemerintah yang terus menggulir sehingga *mon-ev* yang dilakukan tidak maksimal, dan

lemahnya peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

5. Peran Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Tindak Korupsi

Implementasi pendidikan anti korupsi memberikan pengaruh terhadap peran serta upaya mahasiswa program studi pendidikan matematika STKIP PGRI Sumenep dalam mencegah kasus tindak korupsi yang dihadapkan kepada mereka. Beberapa tindakan yang akan mereka lakukan apabila dihadapkan pada kasus tindak penyelewengan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari melalui hasil wawancara antara lain; 1) Melaporkannya pada pihak terkait jika terjadi penyelewengan yang tidak sesuai dengan alurnya. 2) Ikut andil dalam pengawasan terhadap lingkungan sekitar, serta saling mengingatkan satu dengan yang lainnya atau ikut mencegah agar tidak terjadi tindak korupsi, 3) Jika menjadi pemimpin di suatu lingkungan atau instansi, akan melakukan pengawasan penuh terhadap bawahannya, 4) Mereka akan memberikan contoh dalam bertindak, 5) Membuat peraturan yang mengatur tentang penyelewengan, 6) Memenuhi kesejahteraan bagi bawahannya sehingga mengurangi pemikiran untuk melakukan tindak korupsi.

Bila di lingkungan mahasiswa terdapat atau diketahui adanya tindak korupsi, mereka akan melaporkan pada pihak terkait, dan mengingatkan serta menumbuhkan kesadaran orang-orang yang bertindak korupsi.

F. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi terhadap Mental Psikologis Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumenep.

Implementasi pendidikan anti korupsi terhadap mental psikologi mahasiswa program studi pendidikan matematika berbanding terbalik dari implementasi pendidikan anti korupsi terhadap cara berpikir mahasiswa. Hasil observasi data dokumentasi proposal kegiatan mahasiswa program studi pendidikan matematika STKIP PGRI Sumenep, menunjukkan adanya indikator ketidakwajaran dalam penyusunan anggaran belanja panitia terhadap kebutuhan barang dan jasa yang mengalami mark-up harga jauh dari harga riil barang dan jasa tersebut tindakan mereka menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan mental psikologi mereka tindak korupsi.

Pada proposal dan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan mahasiswa semester VI yang tergabung dalam HMP Matrix yakni suatu kegiatan olimpiade matematika. Dalam kegiatan tersebut dianalisa kesesuaian proposal pengajuan dengan laporan pertanggungjawaban serta kesesuaian dengan yang dilakukan dan yang dibelanjakan sebagai gambaran bagaimana dampak atau pengaruh mata kuliah anti korupsi terhadap aktivitas mahasiswa sehari hari.

Berikut ini adalah data tabel estimasi dana dalam penyelenggaraan kegiatan mereka beserta penjelasan perencanaan

anggaran yang tidak wajar dan janggal.

Estimasi Dana
OLIMPIADE MATEMATIKA TINGKAT SMA SE-MADURA
HIMPUNAN MAHASISWA PRODI MATEMATIKA
STKIP PGRI Sumenep
Periode 2014-2015

No.	Keterangan	Volume	Frek.	Harga Satuan	Total
A. Kesekretariatan					
1	LPI Kegiatan	3 dks	1 kali	Rp. 3.300,00	Rp. 9.900,00
2	Pengandaan Proposal	6 dks	1 kali	Rp. 5.000,00	Rp. 30.000,00
3	Amplap	2 pack	1 kali	Rp. 17.000,00	Rp. 34.000,00
4	Stempel Panitia	1 Batang	1 kali	Rp. 25.000,00	Rp. 25.000,00
5	Pengandaan Brosur	150 buah	1 kali	Rp. 1.000,00	Rp. 150.000,00
6	Kertas Sertifikat & Piagam	4 Rem	1 kali	Rp. 25.500,00	Rp. 102.000,00
7	Tinta	4 Botol	1 kali	Rp. 45.000,00	Rp. 180.000,00
8	Kertas A4	7 Pack	1 kali	Rp. 35.000,00	Rp. 245.000,00
9	Sewa Printer		1 kali	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00
10	Biaya Post	130 bps	1 kali	Rp. 5.000,00	Rp. 650.000,00
Sub total					Rp. 1.525.900,00

B. Konsumsi					
1	Konsumsi Dewan Juri	3 orang	1 kali	Rp. 20.000,00	Rp. 60.000,00
2	Konsumsi Undangan	30 orang	1 kali	Rp. 5.000,00	Rp. 150.000,00
3	Konsumsi Panitia	30 orang	1 kali	Rp. 5.000,00	Rp. 150.000,00
4	Konsumsi Peserta	260 orang	1 kali	Rp. 13.000,00	Rp. 3.380.000,00
5	Konsumsi Guru Pendamping	130 orang	1 kali	Rp. 13.000,00	Rp. 1.690.000,00
6	Air Mineral Botol	1 kardus	1kali	Rp. 30.000,00	Rp. 30.000,00
7	Air Mineral Gelas	24 kardus	1 kali	Rp. 12.000,00	Rp. 288.000,00
Sub total					Rp. 5.748.000,00
C. Publikasi					
1	Honorar	2 buah	1 kali	Rp. 200.000,00	Rp. 400.000,00
2	Id Card Peserta	260 buah	1 kali	Rp. 1.500,00	Rp. 390.000,00
3	Piala	1 set	1 kali	Rp. 100.000,00	Rp. 100.000,00
4	Transportasi Dewan Juri	3 orang	1 kali	Rp. 200.000,00	Rp. 600.000,00
Sub total					Rp. 1.490.000,00
D. Lain-lain					
1	Juara 1	1 orang	1 kali	Rp. 1.000.000,00	Rp. 1.000.000,00
2	Juara 2	1 orang	1 kali	Rp. 750.000,00	Rp. 750.000,00
3	Juara 3	1 orang	1 kali	Rp. 500.000,00	Rp. 500.000,00
4	Hatapur 1	1 orang	1 kali	Rp. 300.000,00	Rp. 300.000,00
5	Hatapur 2	1 orang	1 kali	Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00

1. Seksi kesekretariatan

Seksi kesekretariatan terinci kebutuhan anggaran pembuatan LPJ kegiatan, Pengandaan proposal, amplap, stempel panitia, pengandaan brosur, kertas sertifikat&piagam, tinta, kertas A4, sewa printer, biaya post. Namun dari beberapa usulan yang ditulis pada bagian kesekretariatan terdapat beberapa yang kurang logis misalnya : jumlah kertas sertifikat&piagam sebanyak 4 rem dan kertas A4 sebanyak 7 Pack. Jika dicermati dalam 1 rem sejumlah 500 lembar dan jika 4 rem berarti sejumlah 2000

lembar. Sedangkan peserta yang direncanakan hanya sejumlah 260 peserta. Selain itu perencanaan pembelian A4 sebanyak 7 pack atau 7 rem. Sedangkan dalam perencanaan kegiatan, yang memerlukan kertas sebagai penunjang kegiatan hanya pembuatan proposal, daftar hadir, soal tes.

2. Seksi Konsumsi

Dalam seksi konsumsi terinci kebutuhan anggaran untuk konsumsi dewan juri, undangan, panitia, peserta, dan guru pendamping serta air mineral botol dan gelas. Dari rencana anggaran yang tersusun terdapat 1 anggaran kebutuhan yang kurang logis seperti pembelian air mineral yang membutuhkan sebanyak 24 kardus dimana setiap kardus berisi 48 gelas. Padahal total undangan yang menghadiri kegiatan tersebut sebanyak 473 orang yang setara dengan 10 kardus.

G. Penutup

Implementasi mata kuliah pendidikan anti korupsi memberikan pengaruh signifikan terhadap cara berfikir mahasiswa program studi pendidikan matematika STKIP PGRI Sumenep. Para mahasiswa telah memahami konsep dasar tentang pendidikan anti korupsi, dan mampu merespon kasus tindak korupsi yang dihadapkan kepada mereka dengan pola berpikir sesuai dengan teori yang telah didapatkan pada mata kuliah

pendidikan anti korupsi.

Namun di sisi lain, implementasi mata kuliah pendidikan anti korupsi terhadap mental psikologis tidak berdampak signifikan. Hasil observasi data dokumentasi proposal kegiatan mahasiswa program studi pendidikan matematika STKIP PGRI Sumenep, menunjukkan adanya indikator ketidakwajaran dalam penyusunan anggaran belanja panitia terhadap kebutuhan barang dan jasa yang mengalami mark-up harga jauh dari harga riil barang dan jasa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA:

- Hakim, Lukman.** Model Integrasi Pendidikan anti korupsi dalam kurikulum pendidikan
- Kemdikbud.** 2011. *Pendidikan anti korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Maheka, Arya.** 2008. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi
- Syarbini, Amirulloh & Muhammad Arbain,** 2014. *Pendidikan Anti Korupsi, Konsep, strategi, dan implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah/Madrasah*. Bandung: Alfabeta.
- Suradi.** 2002. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Zuhriah, Nurul.** 2011. *Pendidikan Moral & Budi Pekerti*. Jakarta: Bumi Aksara.